

SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA DINAS PUPR DENGAN CV. GARUDA JAYA BERSAMA DI PENGADILAN NEGERI SIMPANG EMPAT

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

Pembimbing :
Nanda Utama, S.H., M.H
Andalusia, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
ANTARA DINAS PUPR DENGAN CV. GARUDA JAYA BERSAMA
DI PENGADILAN NEGERI SIMPANG EMPAT**

**(Muhammad Arif,1910112057,Fakultas Hukum Universitas Andalas,72
halaman,2023)**

ABSTRAK

Jasa konstruksi tentu saja memegang peran penting dalam menjalankan pembangunan nasional karena mengingat jasa konstruksi merupakan pihak yang menyediakan bahan baku, peralatan maupun pekerja sehingga menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau fasilitas umum lainnya yang dapat dilihat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terdapat dua pihak yang mengadakan kontrak kerja konstruksi, pertama adalah pengguna jasa dapat berupa perseorangan atau badan hukum. Kedua adalah penyedia jasa dapat berupa perseorangan atau badan hukum. Demi mendukung pertumbuhan ekonomi, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan pembangunan terkait *Landscape* Masjid Agung Pasaman Barat dengan menunjuk CV. Garuda Jaya Bersama sebagai kontraktor. Permasalahan hukum dalam penelitian ini yang pertama bagaimana permasalahan hukum yang terjadi dari sengketa kontrak kerja konstruksi antara Dinas PUPR dengan CV. Garuda Jaya Bersama di Pengadilan Negeri Simpang Empat. Sedangkan yang kedua bagaimana penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi antara Dinas PUPR dengan CV. Garuda Jaya Bersama di Pengadilan Negeri Simpang Empat. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pertama adalah mekanisme dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dalam pemilihan penyedia jasa menggunakan metode tender dengan dilakukan melalui metode evaluasi pascakualifikasi satu file- harga terendah sistem gugur sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 serta dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pihak CV. Garuda Jaya Bersama melakukan wanprestasi karena pekerjaannya tidak dapat diselesaikan tepat waktu dan dilakukan pemutusan kontrak oleh Dinas PUPR, yang kedua upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara Dinas PUPR dengan CV. Garuda Jaya Bersama yang telah melalui tahapan negosiasi/musyawarah sampai dengan diselesaikannya sengketa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi di pengadilan.

Keyword : Kontrak Kerja Konstruksi, Wanprestasi, Pemutusan Kontrak